panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN
HASIL EVALUASI SPBE
2023

PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	**2,79**	**3,66**	**3,40**	**2,95**	**3,01**	**2,59**	**2,50**
Domain Kebijakan	**2,91**	**3,63**	**3,47**	**3,06**	**3,17**	**2,72**	**3,20**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	**2,27**	**3,42**	**3,02**	**2,66**	**2,56**	**2,01**	**2,54**
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	**1,65**	**2,53**	**2,31**	**1,98**	**1,81**	**1,45**	**1,82**
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	**3,45**	**4,21**	**3,99**	**3,43**	**3,64**	**3,28**	**3,67**
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

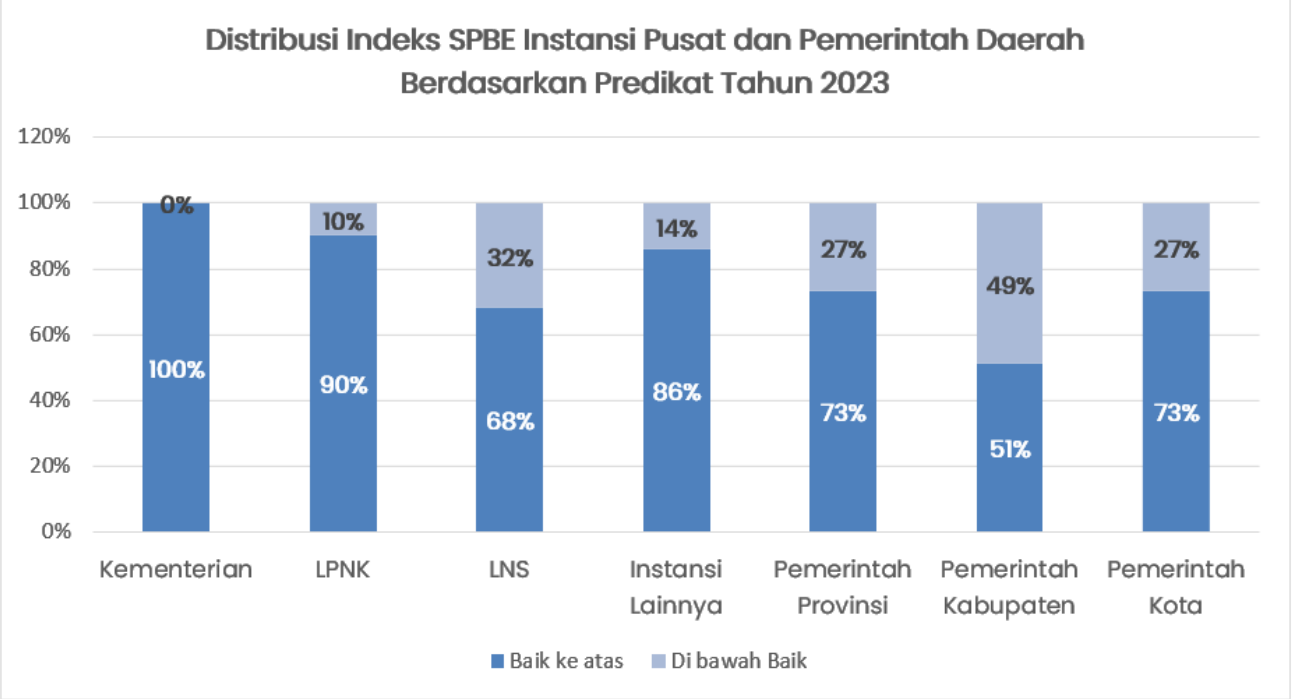

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA

2,89

(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

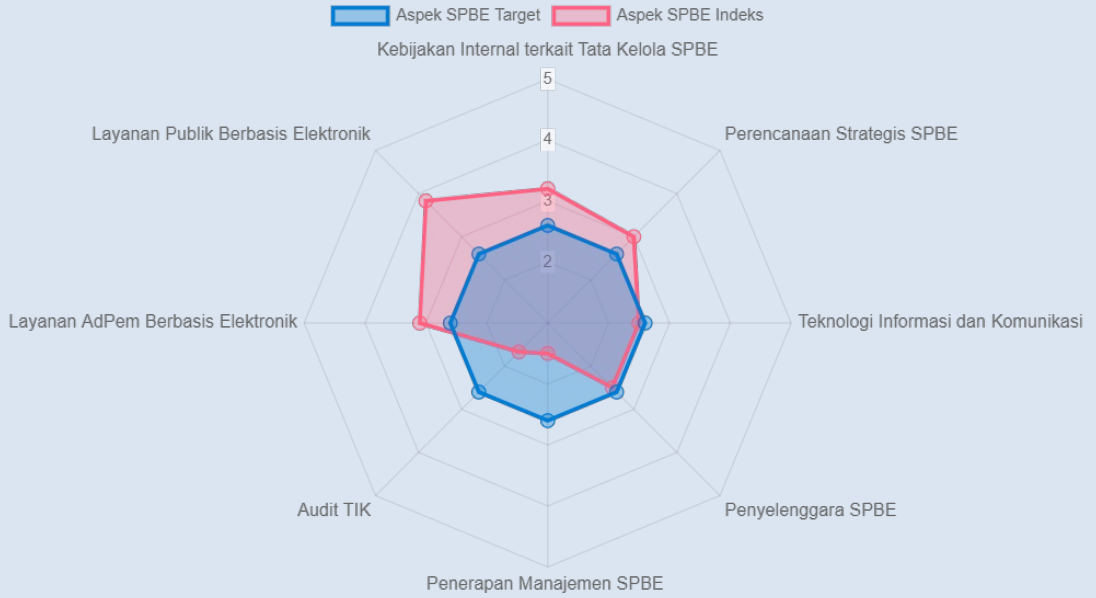

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	**2,89**
Domain Kebijakan SPBE	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*3,20*
Domain Tata Kelola SPBE	2,70
Perencanaan Strategis SPBE	*3,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*2,50*
Penyelenggara SPBE	*2,50*
Domain Manajemen SPBE	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	*1,50*
Audit TIK	*1,67*
Domain Layanan SPBE	3,39
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,10*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*3,83*

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan Penerapan pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE untuk indikator 1-10 sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka

- Kekuatan
  Pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE ini, terdapat indikator 1 dan 2 yang menunjukkan kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka
- Kelemahan
  Namun, di sisi lain, pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE ini, terdapat indikator 4 dan 5 yang menunjukkan kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan aspek perencanaan strategis untuk indikator 11-14 sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka

- Kekuatan
  Pada aspek perencanaan strategis, terdapat indikator 11 yang menunjukkan kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka
- Kelemahan
  Namun, di sisi lain, terdapat indikator 13-14 yang menunjukkan kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka pada aspek perencanaan strategis

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk indikator 15-17 sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Tetapi untuk indikator 18 belum terpenuhi

- Kekuatan
  Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdapat indikator 16 yang menunjukkan kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka
- Kelemahan
  Namun di sisi lain, pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdapat indikator 17,18 yang menjadi kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan aspek penyelenggara SPBE untuk indikator 19-20 sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.

- Kekuatan
  Pada aspek penyelenggara SPBE tidak terdapat indikator yang menunjukkan kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka
- Kelemahan
  Namun di sisi lain, Pada aspek penyelenggara SPBE, terdapat indikator 19 yang menunjukkan kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan aspek penerapan manajemen SPBE untuk indikator 22,23,25 sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sedangkan indikator 21, 24,26, 27,28 belum terpenuhi.

- Kekuatan
  Pada aspek penerapan manajemen SPBE tidak ada indikator yang menunjukkan kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka
- Kelemahan
  Namun di sisi lain, pada aspek penerapan Manajemen SPBE, terdapat indikator 21,23,24, 25,26,27,28 yang menunjukkan kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan aspek Audit TIK untuk indikator 29,30 sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sedangkan indikator 31 belum terpenuhi.

- Kekuatan

Pada aspek Audit TIK, tidak ada indikator yang menunjukkan kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka

- Kelemahan
  Namun di sisi lain, pada aspek Audit TIK terdapat indikator 29-31 yang menunjukkan kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk indikator 32-41 telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka

- Kekuatan
  Pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat indikator 32,33,35, 36 yang menunjukkan kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka
- Kelemahan
  Namun, di sisi lain, pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat indikator 38,39, 40 yang menunjukkan kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik untuk indikator 42-47 telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka

- Kekuatan
  Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terdapat indikator 42, 44,46 yang menunjukkan kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Majalengka
- Kelemahan
  Namun, di sisi lain tidak terdapat indikator yang menunjukkan kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Majalengka, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik . Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Majalengka masih terdapat banyak kelemahan, pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Apresiasi perlu diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang secara umum mendapat hasil evaluasi SPBE dengan predikat baik pada tahun 2023 ini

Untuk aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, indikator 3-10 perlu ditingkatkan

UNtuk aspek Perencanaan strategis, indikator 12-14 perlu ditingkatkan

Untuk aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, indikator 15,17,18 perlu ditingkatkan

Untuk aspek penyelenggara SPBE, indikator 19-20 perlu ditingkatkan

Untuk aspek penerapan manajemen SPBE, indikator 21-28 perlu ditingkatkan

Untuk aspek Audit TIK, indikator 29-31 perlu ditingkatkan

Untuk aspek layanan administrasi berbasis elektronik, indikator 34,37,38, 39,40 41 perlu ditingkatkan

Untuk aspek layanan publik berbasis elektronik, indikator 43,45,47 perlu ditingkatkan

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3